

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergerakan globalisasi dapat menyebabkan terjadinya integrasi di pasar dunia. Fenomena ini mengimplikasikan bahwa suatu negara tidak dapat menghindari dampak dari perubahan ekonomi di negara lain. Konsep ini didukung dalam perspektif ilmu ekonomi yang menggambarkan globalisasi sebagai proses integrasi ekonomi setiap negara ke dalam sistem ekonomi dunia (Salihin, 2019). Artinya, kondisi perekonomian suatu negara tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan dan faktor internalnya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dari negara lain (Afni et al., 2018).

Globalisasi telah mempengaruhi hilangnya batasan wilayah antar negara dan mengurangi hambatan dalam interaksi serta komunikasi (Nur Wulan, 2020). Di Asia Tenggara, negara-negara telah membentuk *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai bentuk kerjasama regional. Salah satu inisiatif utama ASEAN adalah *ASEAN Economic Community* (AEC) yang mencakup berbagai aspek termasuk investasi portofolio di pasar modal (Bodie et al., 2014).

Pasar modal memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara dengan melakukan dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan, mendorong ekspansi pasar dan penambahan modal. Kedua, sebagai tempat bagi investor untuk mengalokasikan investasinya dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya (Akbar et al., 2017).

Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi keuangan yang strategis di antara sistem keuangan saat ini dalam memberikan kesempatan bagi investor untuk memilih investasi yang produktif dan menghasilkan laba lebih besar. Integrasi pasar modal antar negara juga memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat (Fadilla, 2018).

Sektor keuangan mengalami pertumbuhan signifikan, terbukti dengan meningkatnya permintaan akan berbagai fasilitas keuangan, baik fisik maupun digital, melalui lembaga perbankan dan non-bank (Abdurrohman, dkk, 2021). Penggunaan pasar modal sebagai instrumen ekonomi penting untuk investasi telah menyebar di hampir semua negara di seluruh dunia, menarik minat banyak pengusaha dan investor untuk terlibat aktif (Romadhon et.al., 2022).

Oleh sebab itu, pasar modal juga telah berkembang untuk mencakup instrumen keuangan syariah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fadilla, 2018). Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemodal yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Bursa efek di seluruh dunia telah memperkenalkan indeks saham yang memenuhi kriteria syariah untuk memfasilitasi jenis investasi ini. Pengembangan lembaga keuangan syariah juga memberikan alternatif baru bagi investor dan pelaku ekonomi, dengan menawarkan Institusi Keuangan Islam (*Islamic Financial Institution*) dan instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah (Hasanah & Maspupah, 2018).

Pasar modal syariah tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga hadir di berbagai negara di seluruh dunia. Salah satunya adalah melalui *Indeks Dow Jones*

Islamic Market yang mencakup 34 negara, antara lain Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Indeks ini menyertakan saham dari berbagai sektor ekonomi dan industri, dengan total 10 sektor pasar, 51 kelompok industri, dan 89 sub kelompok industri (Irfan, 2014).

Berdasarkan perkembangannya pasar modal syariah memiliki peran penting di negara-negara ASEAN tetapi juga membawa resiko, terutama terkait dengan isu-isu global seperti perubahan iklim (*Climate Change*) (Carleton & Hsiang, 2016). Menurut penelitian Oceania (2022) menyatakan bahwa isu-isu tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar modal syariah, memicu kepanikan di kalangan investor, dan meningkatkan kehati-hatian dalam pengalokasian dana. Hal ini terjadi karena investor cenderung melihat peluang ekonomi dalam suatu negara dan dapat beralih investasi ke negara dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil.

Perubahan iklim yang menjadi topik pembahasan dalam *World Economic Forum Davos 2020*, telah mencapai titik kritis akibat pemanasan global, seperti pencairan lapisan es di kutub (Aizebeokhai, 2009). Isu ini semakin kompleks karena melibatkan dimensi ilmu pengetahuan diantaranya, sains, etika dan moral, sosial, ekonomi, serta politik. Pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi masa depan dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 yang menggambarkan dampak dari *climate change*.



Gambar 1. 1 Gambar Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Iklim

Sumber: *Iberdrola Fographic Impact Climate Change, 2023*

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa perubahan iklim memiliki dampak negatif yang luas, termasuk ancaman terhadap stabilitas ekonomi global. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi menghasilkan gelombang panas yang mengurangi produktivitas manusia dan tingkat produksi (Daisy, 2018).

Salah satu dari perubahan iklim ini adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca yang diperkirakan telah menyumbang sekitar 30% dari total emisi CO₂ dari tahun 1861 hingga 2000. dengan adanya peningkatan emisi dan tanpa ada upaya yang signifikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dampak perubahan iklim akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya perubahan iklim (Masripatin et al., 2016). Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengatasi penipisan sumber daya dan pencemaran lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan limbah telah menjadi perhatian negara-negara di dunia (Dantas et al., 2021).

Menurut *Six Assessment Report 2022* dari IPCC, dampak perubahan iklim sudah semakin banyak terjadi di berbagai belahan dunia termasuk pada negara-negara ASEAN. Dampak yang lebih parah akan terjadi jika masyarakat global

gagal melakukan langkah adaptasi dan mitigasi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berikut grafik yang menunjukkan adanya peningkatan suhu dan emisi karbon di negara ASEAN.



Gambar 1. 2 Emisi Karbon (CO₂) dari Pembakaran Energi dan Aktivitas Industri di Skala Global (2001-2021)

Sumber: *International Energy Agency (IEA)*

Berdasarkan gambar 1.3 *International Energy Agency (IEA)* mencatat bahwa pada tahun 2020 emisi karbon di skala global sempat menurun akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai negara terkait pandemi Covid-19. Namun, kendati pandemi masih berlangsung, pada 2021 emisi karbon global kembali naik hingga mencapai 36,3 gigaton CO₂ dan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Emisi karbon pada 2021 meningkat sekitar 6% dari tahun 2020, beriringan dengan pemulihan ekonomi global yang tumbuh sebesar 5,9% dalam periode sama (Daisy, 2018).

Menurut para ilmuwan, efek gas rumah kaca dapat menjelaskan pemanasan global karena pelepasan gas dari bumi ke atmosfer, termasuk karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO₂), metana (CH₄), dan gas lainnya, yang dapat memanaskan Bumi (Herdiawan et al., 2020). Oleh karena itu, kedepannya para

ilmuwan menyatakan bahwa jika tidak ada tindakan mitigasi, temperatur bumi berpotensi meningkat antara 1,1°C hingga 5,4°C lebih panas dari kondisi saat ini. Aktivitas manusia telah menyebabkan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi sekitar 1,1°C dari akhir abad ke-19 hingga 2022 (Herring, 2012).

Negara-negara di seluruh dunia telah mengikuti upaya untuk memitigasi perubahan iklim dengan berkomitmen untuk mengurangi dan membatasi emisi gas rumah kaca menggunakan teknologi canggih (Serrano et al., 2021). Namun, hanya pemerintah yang mewakili 55% emisi gas rumah kaca dunia yang telah mengumumkan target spesifik untuk meningkatkan pengurangan emisi karbon pada tahun 2030, dengan sebagian besar negara masih bertujuan untuk mencapai emisi karbon nol pada tahun 2050-2070 (Chen et al., 2022). Sementara itu, sistem energi di negara-negara berkembang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, dengan konsumsi batu bara dan minyak yang tinggi di industri dan transportasi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan masalah pencemaran lingkungan (Binh Bui, 2019; Urban, 2021).

Selain itu, dengan populasi global dan standar hidup yang terus meningkat, otomatisasi manufaktur telah mengarah pada produksi dan konsumsi massal, yang mengakibatkan peningkatan produksi limbah padat. Peningkatan volume dan kompleksitas limbah menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Romero et al., 2022). *Swiss Re Institute* (2021) memprediksi bahwa perubahan iklim dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi dunia sebesar 11-18% atau sekitar US\$ 23 triliun pada 2050 jika temperatur global meningkat 3.2 °C. Penurunan PDB diperkirakan lebih signifikan

untuk negara-negara Asia sebesar 15-26,5%, khususnya untuk ASEAN yang mengalami penurunan sebesar 17-37,4% dengan skenario yang sama di tunjukkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Skenario Penurunan PDB oleh Pemanasan Suhu Bumi

	Skenario kenaikan suhu bumi, 2050				
	Dibawah 2 °C	2 °C	2,6 °C	2,2 °C	3 °C
	Target Paris Agreement	Kemungkinan suhu bumi yang akan terjadi	Kemungkinan	kenario	Skenario Terburuk
Global	4,2%	11,0%	13,9%	18,1%	-
OECD	3,1%	7,6%	8,1%	10,6%	-
Amerika Utara	3,1%	6,9%	7,4%	9,5%	-
Amerika Selatan	4,1%	10,8%	13,0%	17,0%	-
Eropa	2,8%	7,7%	8,0%	10,5%	-
Timur Tengah & Afrika	4,7%	14,0%	21,5%	27,6%	-
Asia	5,5%	14,9%	20,4%	26,5%	-
• Negara Maju Asia	3,3%	9,5%	11,7%	15,4%	-
• ASEAN	4,2%	17,0%	29,0%	37,4%	-
Oceania	4,3%	11,2%	12,3%	16,3%	-

Sumber: *Swiss Re Institute: The Economics Of Climate Change, 2023*

Menurut IEA, peningkatan emisi karbon terjadi hampir di seluruh negara, dengan peningkatan paling besar di Brasil, India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa. Untuk merespon masalah ini IEA menekankan perlunya penguatan investasi berkelanjutan di bidang teknologi energi baru dan terbarukan (EBT). IEA pun menegaskan bahwa dunia harus berupaya mengurangi emisi CO₂ pada tahun 2022, serta mengejar target nol-emisi pada 2050 (Wang et al., 2018; Ayu et al., 2021).

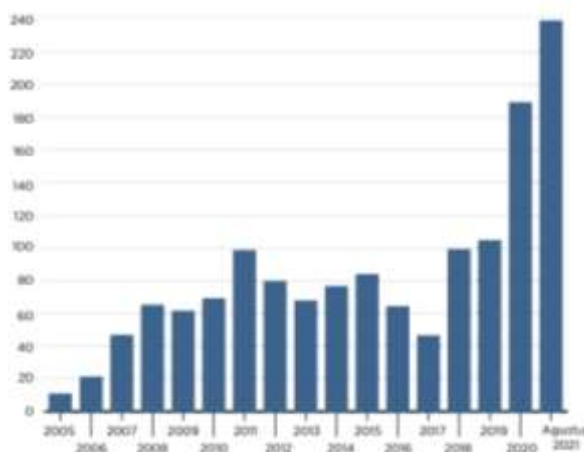
Perubahan iklim menjadi salah satu isu global yang diangkat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-20230. Isu- isu ini memiliki

ketimpangan pada sosial dan kerusakan lingkungan yang mendominasi agenda pembangunan dalam lima tahun terakhir (Wayan Budiasa, 2020). Salah satu tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah mengatasi perubahan iklim, yang termasuk dalam SDGs pada poin 13 (United Nations, 2015). Yang mana tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengambil tindakan segera untuk memerangi dampak perubahan iklim. Kesepakatan ini tertuang dalam *Paris Agreement on Climate Change* (PACC) tahun 2015-2030, yang merupakan komitmen internasional untuk melakukan mitigasi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan tujuan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mencapai suhu di bawah 2⁰C di atas tingkat pra-industri dan untuk melanjutkan tindakan untuk membatasi kenaikan hingga 1.5⁰C (Mongo et al., 2022; Afni, 2018; Khanna et al., 2022; Leonard et al., 2021). Menghadapi rumor tersebut, kebijakan mengenai perubahan iklim dalam naungan PBB mewajibkan negara Anex sebagai negara industri untuk menyepakati pengurangan emisi karbon (Daisy, 2018). Negara-negara di dunia telah sepakat untuk memenuhi target mitigasi perubahan iklim (Fawzy et al., 2021).

Di sisi lain, negara Indonesia memiliki standar yang dikenal sebagai ISO 14001. ISO 14001 merupakan standar Internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML), yang merupakan peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan perusahaan yang bersertifikat dengan dukungan perusahaan untuk membuat pengelolaan lingkungan dan pelestarian lingkungan menjadi transparan (Hanisyah et al., 2021). Perusahaan yang disertifikasi ISO 14001 menjalankan operasinya sesuai dengan komitmen serta tanggung jawab

manajemen, juga dokumentasi sistem manajemen, kontrol pelatihan, dan persyaratan pemantauan. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat ditingkatkan berdasarkan aktivitas bisnis (Anggraini et al., 2021).

Sementara itu, pengungkapan emisi karbon masih dianggap sebagai tindakan sukarela (*voluntary disclosure*) jika perusahaan mengungkapkan informasi tanpa diwajibkan oleh regulasi yang berlaku. Karena sifat sukarela ini, pengungkapan emisi karbon masih kurang umum dilakukan oleh perusahaan (Nurarifah, 2020). Perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosial mereka dengan mengurangi emisi karbon dan investor dapat menggunakan informasi tersebut sebagai ukuran kinerja mereka melalui laporan (Pratiwi, 2016). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Gambar 1. 3 Perkembangan Pasar Karbon Sukarela (juta ton CO₂)

Sumber: *Ecosystem Marketplace News - Verra*, 2023

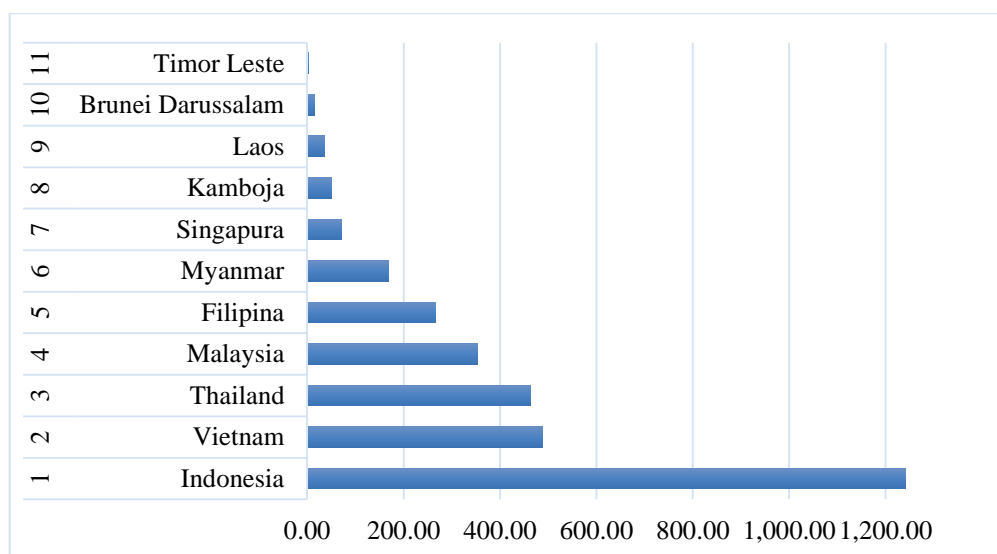
Pasar karbon sukarela telah mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari segi volume kredit karbon maupun minat investor dan pembeli yang ingin memenuhi komitmen hijau industri, seperti yang terlihat dalam gambar 1.4.

Secara strategis, pasar karbon sukarela dapat mengalirkan investasi ke sektor-sektor yang tidak tercakup dalam NDC (*Nationally Determined Contributions*) dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Andriadi et al., 2020). Menurut laporan *State of the Voluntary Carbon Markets* dari *Ecosystem Marketplace*, nilai pasar karbon sukarela mencapai \$2 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya proyek *Natural Climate Solutions* (NBS) yang memiliki nilai karbon yang tinggi.

Pengungkapan emisi karbon memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam laporan tahunannya, menunjukkan transparansi terhadap kepedulian perusahaan terhadap perubahan iklim (Yang et al., 2022). Selain itu, pengungkapan emisi karbon juga dapat membantu perusahaan untuk menghindari risiko reputasi dan hukum yang dapat muncul akibat emisi gas rumah kaca. *Carbon Emissions Disclosure* (CED) dianggap sebagai perlakuan akuntansi yang penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan isu global lainnya (Tommy & Kevin, 2021).

Dalam hal ini *climate change* memiliki hubungan yang erat dengan *circular economy*. *Circular economy* merupakan sebuah strategi dan model pendekatan yang berguna untuk meningkatkan keberlanjutan dunia yang mana telah tertuang dalam SDGs pada poin ke 13 yang menganut hukum alam (Korhonen J, Honkasalo A, n.d.). Semakin jelas bahwa optimalisasi struktural langkah-langkah pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa strategi ekonomi sirkular (Alhawari et al., 2021).

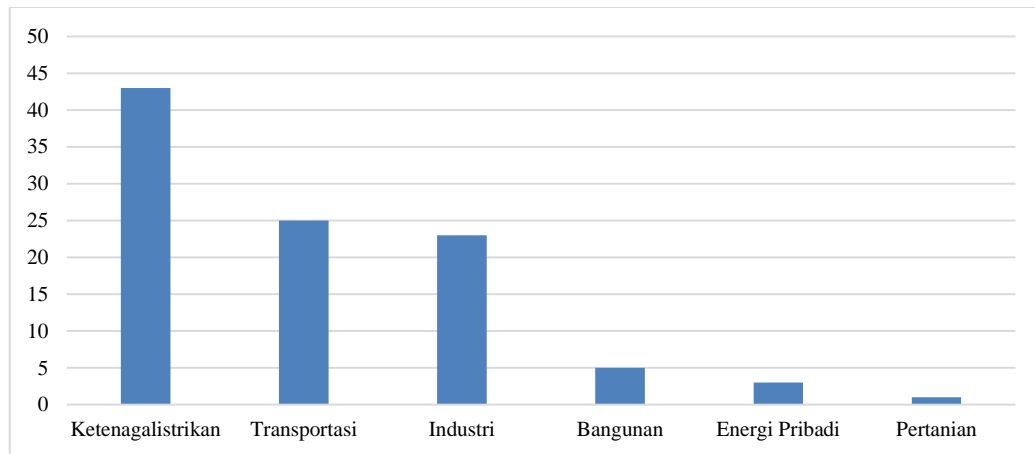
Namun, masih banyak ditemui secara umum negara-negara termasuk pada Asia Tenggara dalam memaparkan emisi karbon tidak transparan dalam pelaporannya termasuk yang tertinggi adalah negara Indonesia (Sutartib & Purnawa, 2021). Dalam hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting urgensi nya dalam keberlangsungan suatu negara ataupun perusahaan yang bergerak diberbagai sektor didalamnya. Hal ini didasari oleh banyak faktor, terutama perusahaan yang bergerak di sektor industri dengan bahan bakar *fossil*, eksploitasi energi pada sektor pembangkit listrik, penggunaan lahan (*land use and forestry*) di sektor perhutanan, dan lain sebagainya (Wahyuning, 2022). Dan urgensinya menurut data European Commission, volume emisi karbon tahun 2022 negara Indonesia berada di peringkat utama diantara negara-negara di Asia tenggara yang menyumbang emisi terbesar dengan angka 1.240,8 juta ton setara karbon monoksida (Mt CO₂e) dan karbon dioksida (Gt CO₂e). Berikut merupakan volume emisi pada tahun 2022 di Asia Tenggara.



Gambar 1. 4 Volume Emisi Negara Di Asia Tenggara (Juta ton)

Sumber: *Databok News*, 2022

Sebagai contoh di Indonesia, salah satu sektor perusahaan yang masih menyumbang emisi terbesar adalah ketenagalistrikan sekitar 43% dari total emisi di Indonesia. Sektor kedua yakni transportasi sebesar 25%. Disusul sektor industri sebesar 23%. Adapun grafik nya disajikan, sebagai berikut.



Gambar 1. 5 Proporsi Kontribusi Emisi CO₂ Terkait Energi Berdasarkan Sektor (dalam %)

Sumber: *Databok News*, 2021

Tema-tema seperti pengungkapan emisi seperti ini penting diketahui terutama bagi investor yang ingin bergelut pada investasi tertentu dalam jangka panjang yang efeknya terasa bagi perusahaan-perusahaan yang dituju, dengan kata lain selain dilihat dari aspek *accountable* nya suatu perusahaan juga perlu dilihat kinerjanya dari tinjauan lingkungan dan sosial disekitarnya (Asyari & Hernawati, 2023). Risiko reputasi terhadap keberlangsungan perusahaan dipertaruhkan karena atensi dari *Co2* dan *MCo2* sangat penting guna memperbaiki alam secara penuh dan global. Fenomena yang mengarah pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini di letakkan atas dasar kepedulian terhadap aspek lain selain *Profit Oriented* yang menjadi tujuan utama pada perusahaan, keterlibatan dari

stakeholder menjadi peran penting bahwa dalam menentukan suatu investasi juga dilihat dari aspek lingkungan dan sosial (Bahriansyah & Lestari, 2022).

Oleh sebab itu, dalam perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dengan tujuan bisnis yang tidak hanya mencakup keuntungan, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan bumi sesuai dengan tujuan ekonomi keberlanjutan (Agung, 2023; (Yang et al., 2022). Islam sudah mengatur mengenai permasalahan kepedulian terhadap lingkungan ini, yang mana dijelaskan dalam firman Allah pada (Q.S. Al-Baqarah: 205), bahwa:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya :

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan” (Q.S. Al-Baqarah: 205).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa penting melakukan upaya untuk mempertahankan dan merawat segala aspek bumi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengurangi emisi di semua sektor, di mana efisiensi energi menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi penggunaan energi (Lako, 2015). Banyak negara telah memiliki kebijakan terkait pengurangan emisi, namun implementasi kebijakan tersebut menjadi kunci utama (D.Chandler, 2002). Penanganan perubahan iklim memerlukan tindakan dan kerjasama internasional, mengingat hal ini merupakan masalah global yang membutuhkan solusi bersama.

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajer memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan yang terkait. Para pemangku kepentingan akan tertarik

untuk mempelajari inisiatif perubahan iklim perusahaan karena perubahan iklim merupakan masalah yang signifikan bagi sebagian besar organisasi di seluruh dunia (Ullmann, 1995). Akibatnya, perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak emisi karbon untuk menenangkan para pemangku kepentingan yang terkait. Sebagai indikasi nyata dari kepatuhan mereka terhadap kelompok pemangku kepentingan yang relevan, perusahaan termotivasi untuk memberikan informasi tentang tindakan mereka kepada para *stakeholder* (Andriadi et al., 2020).

Menurut teori legitimasi, perusahaan dengan catatan lingkungan yang kuat lebih cenderung membuat pengungkapan yang kuat, komprehensif, dan dapat diverifikasi kepada investor untuk membedakan diri mereka dari perusahaan lain yang merugikan. Oleh karena itu, perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang emisi karbon mereka ketika mereka mengadopsi dan menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan (Guthrie & Parker, 1989); Chu, 2013).

Dalam penelitian (Choi et al., 2013), menyatakan ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan metrik yang digunakan untuk menilai skala relatif suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, terutama dalam konteks pengungkapan emisi karbon. Hal ini terkait dengan aktivitas operasional perusahaan besar, khususnya dalam industri, yang cenderung menghasilkan emisi karbon lebih besar dan dampak lingkungan yang lebih signifikan. Dalam penelitian sebelumnya yang dipublikasikan oleh Nasih et al.,

(2019) dengan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar (*firm size*) dan perusahaan dengan ukuran dewan yang lebih besar lebih cenderung memiliki pengungkapan yang lebih tinggi tentang *carbon emission disclosure*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Hermawan et al., 2018), (Zanra et al., 2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan variabel ukuran perusahaan pada pengungkapan emisi karbon.

Peranan dewan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas perusahaan di mata publik, salah satunya adalah independensi. Independensi membantu menjaga kepentingan investor, memberikan panduan kepada manajemen, dan memantau kegiatan manajemen untuk memastikan transparansi informasi. Komisaris independen akan menyajikan lebih banyak informasi setelah mereka mengetahui kebutuhan investor. Oleh karena itu, perusahaan akan mengumumkan pengungkapan emisi karbon (Jaggi et al., 2017). Menurut Chithambo & Taurigana (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan (*board size*) maka akan semakin efektif dalam membuat suatu kebijakan dan strategi yang akan diimplementasikan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan dan strategi yang dilakukan yaitu pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Arifah (2020) hasil yang mengatakan bahwa jumlah *board size* diperusahaan tidak memberikan pengaruh dalam pengungkapan emisi karbon.

Faktor lainnya adalah profitabilitas perusahaan, dalam penelitian yang dilakukan (Choi et al., 2013) menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi akan memungkinkan perusahaan membiayai sumber daya tambahan yang diperlukan

untuk melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Kemampuan finansial mencakup berbagai inisiatif industri untuk membantu mengurangi emisi karbon. Penelitian mengenai profitabilitas oleh (Apriliana et al., 2019) dengan hasil tingkat pengungkapan emisi karbon.

Dalam pengelolaan pengawasan pengungkapan emisi karbon, kepemilikan institusional juga sangat penting. Ini karena kepemilikan konstitusional mendorong sistem untuk mengatur industri untuk menghasilkan nilai tambah bagi para *stakeholder* dan meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan Chang & Zhang (2015) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih banyak mengungkapkan informasi terkait lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nainggolan, 2015; Amaliyah & Solikhah, 2019; Zanra et al., 2020) menyatakan hasil penelitiannya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan penelitian (Tommy & Kevin, 2021; Hermawan et al., 2018; Andriadi et al., 2020) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional pada pengungkapan emisi karbon.

Dalam penelitian ini juga mengambil faktor lainnya yaitu kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah ini memiliki konsep pertanggungjawaban kepada Tuhan yang mendasari pengungkapan kepada makhluk-Nya yaitu masyarakat dan lingkungan alam (Bahari & Baharudin, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, transparansi perusahaan terkait dampak lingkungan dapat mendapatkan dukungan dan kepercayaan yang lebih besar. Pengungkapan emisi karbon dalam perspektif

syariah menjadi signifikan karena melibatkan harmonisasi antara tanggung jawab lingkungan, nilai-nilai syariah, dan prinsip keuangan Islam.

Penelitian ini memiliki keterbaharuan (*novelty*) dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini memiliki motivasi pada pengaruh kepatuhan syariah terhadap pengungkapan emisi karbon yang belum banyak diteliti dalam konteks penelitian terhadap pengungkapan emisi karbon. Kepatuhan syariah dalam konteks ini mencakup aspek lingkungan, di mana kesadaran akan lingkungan ditekankan untuk menjaga keseimbangan alam. Sebagai manusia yang diberikan amanah sebagai khalifah di bumi, tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan bumi serta isinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam (Q.S. Al-Baqarah: 30) yang berbunyi :

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam ayat tersebut memiliki makna bahwa tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan dijadikannya manusia sebagai khalifah yang penuh dengan tanggung jawab termasuk pada lingkungan hidup nya.

Leverage juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengungkapan emisi karbon, hal ini terjadi karena perusahaan yang mengungkapkan informasi sensitif mungkin akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat dan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya, perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung mengadopsi kegiatan pengurangan emisi karbon (Ika, et.al, 2016). Kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon diikuti dengan tingginya *leverage* yang dimiliki (Luo, 2017). Disisi lain, penelitian yang dipublikasikan oleh (Choi et al., 2013; Kılıç & Kuzey, 2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan fenomena terkait adanya *climate change* yang menjadi permasalahan seluruh negara di dunia dan kesenjangan dari peneliti terdahulu, maka sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggabungkan variabel kepatuhan syariah. Sehingga peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Daftar Efek Syariah Di Asean Periode 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu fokus permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Firm size* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN ?
2. Apakah *Board Size* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN ?

3. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN ?
4. Apakah Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN ?
5. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN ?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN.
2. Untuk menganalisis bahwa *Board Size* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN.
3. Untuk menganalisis bahwa *Profitability* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN.
4. Untuk menganalisis bahwa Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN.

5. Untuk menganalisis bahwa Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN.
6. Untuk menganalisis bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan efek syariah di Negara ASEAN.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang mengangkat judul “Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Daftar Efek Syariah di Asean Periode 2018-2022” sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu tentang pengungkapan emisi karbon guna menambah wawasan terkait lingkup perusahaan secara luas dan memperkaya konsep keilmuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon pada Negara ASEAN.

1.4.2 Bagi Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen agar pengurangan emisi karbon menjadi perhatian perusahaan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi manajer untuk membuat kebijakan terkait pengungkapan emisi karbon.

b. Bagi Investor

Investor dalam proses pengambilan keputusan juga mempertimbangkan aktivitas operasi perusahaan yang berdampak terhadap pada kerusakan lingkungan.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pihak pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ataupun referensi dalam rangka sebagai acuan dalam penerapan pengungkapan emisi karbon yang lebih optimal.

d. Bagi Akademisi

Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membantu menambah wawasan tentang pengungkapan emisi karbon ini pada efek syariah dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama atau sejenisnya.